



IPB Today

Volume 394 Tahun 2020

Dewan Guru Besar IPB University dan Asosiasi Profesor Indonesia Berikan Masukan terhadap RUU Cipta Kerja Terkait Pendidikan Tinggi



Profesor Indonesia (API) pada 11 Mei yang lalu, dibentuk Panitia Ad Hoc DGB IPB University tentang RUU Cipta Kerja terkait Pendidikan Tinggi. Melalui Panitia Ad Hoc DGB IPB University ini berhasil dirumuskan kajian dan usulan terhadap RUU Cipta Kerja terkait Pendidikan Tinggi. Dokumen tersebut telah diserahkan dan diterima oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Prof Nizam dan Ketua Komisi X yang ditembuskan juga ke Badan Legislatif (Baleg) di DPR dan Kantor Sekretariat Presiden.

“Sebagai salah satu dari 11 perguruan tinggi negeri yang berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), IPB University memiliki kewajiban memikirkan tidak hanya persoalan-persoalan yang ada di IPB University saja, namun juga persoalan yang ada di masyarakat atau nasional. DGB IPB University sesuai statuta memiliki berbagai tugas yang salah satunya adalah memberi pencerahan dan menjaga nilai-nilai luhur IPB University, budaya akademik, etika akademik, integritas moral, dan kesujanaan sivitas akademika; kemudian mengembangkan pemikiran atau pandangan terkait dengan isu strategis nasional dan atau internasional berupa solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat,” papar Prof Dr Evi Damayanthi, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DGB IPB University pada Press Conference RUU Cipta Kerja terkait Pendidikan Tinggi, Senin (29/6).

Sebagai tindak lanjut dari webinar yang telah diselenggarakan oleh Dewan Guru Besar (DGB) IPB University bekerjasama dengan Asosiasi

Penanggung Jawab: Yatri Indah Kusumastuti **Pimpinan Redaksi:** Siti Nuryati **Redaktur Pelaksana:** Rio Fatahillah CP
Editor : Siti Zulaedah, Rosyid Amrulloh **Reporter :** Dedeh H, Awaluddin, Rizki Mahaputra **Fotografer:** Cecep AW, Bambang A, Rifqi Wahyudi **Layout :** Dimas R, M Rifki Ihsan **Alamat Redaksi:** Biro Komunikasi IPB Gd. Andi Hakim Nasoetion, Rektorat Lt. 1, Kampus IPB Dramaga Telp. : (0251) 8425635, **Email:** humas@apps.ipb.ac.id

Sementara, Prof Ari Purbayanto, Ketua API yang juga Guru Besar IPB University menjelaskan API merupakan asosiasi yang berbasis Iptek dan bersifat independen serta objektif tanpa memihak siapapun termasuk partai politik. Ia juga menjelaskan API tidak mendapat pembiayaan dari pemerintah, melainkan berasal dari anggota API dan usaha yang dilakukan bersama-sama.

“Melalui API, tujuannya sama, yaitu bersama-sama akademisi ikut menyuarakan hal-hal yang perlu disuarakan, karena tugas guru besar adalah mencerahkan masyarakat. Oleh sebab itu, API berusaha memberikan kontribusi dalam memberikan sumbangan pemikiran terhadap hal-hal yang sedang dialami oleh bangsa dan masyarakat, dalam hal ini secara khusus adalah RUU Cipta Kerja terkait Pendidikan Tinggi,” papar Prof Ari.

Prof Hariadi Kartodihardjo, Anggota DGB IPB University menerangkan, masukan untuk penyempurnaan RUU Cipta Kerja dalam bidang Pendidikan Tinggi tersebut diberikan sebagai catatan kritis terhadap arah dunia pendidikan ke depan yang tertuang dalam RUU Cipta Kerja. Terkait dengan pendidikan tinggi tersebut, setidaknya terdapat tiga undang-undang (UU) yang akan diubah, yaitu UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; serta Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

“Yang perlu diantisipasi dalam perubahan tersebut antara lain mengenai besarnya potensi konflik etika akibat penerapan strategi taktis yang memudahkan investasi untuk memproduksi tenaga kerja sambil menafikan norma-norma kebangsaan maupun pilar normatif kebebasan akademik dalam kehidupan perguruan tinggi,” terang Prof Hariadi.

Lebih lanjut ia menerangkan, masukan tersebut telah dibahas melalui webinar yang dilaksanakan pada 11 Mei 2020 dan diikuti oleh Prof Nizam, Plt Dirjen Dikti

Kemendikbud, Dr Ir Hetifah Syaifudin, MPP dan Ferdiansyah SE MM, Komisi X DPR RI.

Beberapa catatan yang diberikan terhadap perubahan pasal pada Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah penerapan pasal-pasal perubahan yang tertuang pada RUU Cipta Kerja berpotensi menghadirkan iklim “free fight liberalism” dalam pendidikan tinggi. Sementara itu, terkait UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, catatan yang diberikan adalah tindak pidana dan denda yang masih berlaku yaitu terhadap lulusan yang karya ilmiahnya terbukti merupakan jiplakan dengan pidana penjara maksimal dua tahun dan atau denda paling banyak Rp 200 juta (Pasal 70), serta bagi penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin dipidana paling lama sepuluh tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 1 milyar (Pasal 71). Adapun catatan yang diberikan terkait UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah Tinjauan pasal-pasal pada undang-undang tersebut hanya untuk dosen saja. **(RA)**

Akses
berita IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id

Bicara Setnet, Teknologi Penangkapan Ikan Masa Depan, Departemen PSP IPB University Hadirkan Pakar dari Jepang



Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University kembali menggelar Webinar 4th Voice for Fisheries dengan tema Setnet, Teknologi Penangkapan Ikan Masa Depan di Indonesia (27/6). Webinar ini dihadiri oleh 500 peserta dari Sabang sampai Merauke serta pakar Setnet dari Tokyo University of Marine Science Technology yaitu Prof Takafumi Arimoto dan Dr Yoshio.

Hadir juga Prof Dr Rokhmin Dahuri, Staf Ahli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI yang menyampaikan bahwa perikanan tangkap berkelanjutan ialah sistem bio-ekonomi perikanan tangkap yang menghasilkan tangkapan ikan yang dapat mensejahterakan seluruh nelayan secara berkeadilan dan dapat memelihara keberlanjutan stok ikan beserta ekosistem perairannya.

“Ada disparitas pembangunan antar wilayah yang sangat jomplang di Indonesia. Pulau Jawa yang luasnya sekitar lima persen namun sumbangannya ekonominya mencapai 60 persen. Sementara 80 persen wilayah Indonesia mulai dari Kalimantan, Bali sampai Papua sumbangan ekonominya hanya sekitar 19 persen. Jadi ini sangat benefit jika kita bisa mengembangkan Setnet karena lokasinya adalah di pesisir di luar Jawa. Jadi akan membantu distribusi pertumbuhan ekonomi, tidak hanya menumpuk di pulau Jawa,” ujarnya.

Menurutnya, jika ingin mensejahterakan nelayan maka harus dilakukan modernisasi sehingga produktivitasnya meningkat. Kalau kebijakannya tidak mengizinkan aktif fishing gear itu sama dengan membunuh nelayan. Kebijakan perikanan ke depan adalah mengurangi fishing effort untuk daerah overfishing. Kebijakan kedua adalah meningkatkan fishing effort berbasis wilayah pengelolaan perikanan (WPP). “Dan kebijakan ketiga adalah jangan bertahan terus namun harus ada pengembangan armada Ocean Going Fisheries RI yang kompetitif untuk beroperasi di perairan internasional. Ada beberapa peluang pada aplikasi API (alat penangkapan ikan) Setnet. Diantaranya adalah hemat bahan bakar dan tenaga kerja karena dipasang menetap,” ujarnya.

Sementara itu, Dr Besweni mewakili Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, KKP RI menjelaskan bahwa jaring Setnet yang terpasang di laut dapat digunakan sebagai tempat berlindung (shelter) ikan berukuran kecil sehingga tidak dimakan oleh predator. “Hasil tangkapan ikan relatif segar atau masih hidup. Alat Penangkap Ikan Setnet mudah dipindahkan dibanding dengan jenis trap yang ada di Indonesia. Setnet dapat digunakan untuk mendukung pengembangan usaha perikanan skala menengah ke bawah serta mendukung ketahanan pangan selain itu juga dapat dikombinasikan dengan sektor lain seperti wisata bahari dan kuliner,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Prof Sudirman menjelaskan bahwa Setnet merupakan alat tangkap yang ramah lingkungan, hemat bahan bakar, memiliki daerah penangkapan yang tidak jauh, mutu hasil tangkapan yang tinggi serta dapat dilakukan secara berkelompok.

“Hasil tangkapan pertama pada Maret 2008 saat kita aplikasikan di Bone mencapai 278.4 kilogram. Ada 67 jenis ikan yang tertangkap meliputi 34 jenis demersal, 29 jenis pelagis dan 4 jenis crustacea,” tuturnya.

Sementara itu, Prof Dr Mulyono S Baskoro, dosen IPB University yang juga Ketua Divisi Teknologi Penangkapan Ikan Departemen PSP sebagai pembahas menyampaikan bahwa pada tahun 1990 berdasarkan analisis teknik ekonomi dan sosial, Setnet layak dikembangkan di perairan pantai. Akan tetapi Setnet belum bisa dikembangkan secara berkelanjutan hingga saat ini.

"Menurut saya teknologi ini masih dininabobokkan. Kita masih berorientasi pada pekerjaan project, tidak ada pendampingan supaya Setnet ini langgeng. Oleh karena itu kita perlu grand strategi dan harus fokus bagaimana kita punya program 5 tahun atau 10 tahun," tandasnya.

Secara umum, penelitian tentang Setnet dan juga alat penangkap ikan lain yang ramah lingkungan dan produktif dari sisi ekonomi harus terus dikembangkan dalam konteks pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan, di sisi lain pengelolaan perikanan

membutuhkan sumberdaya manusia yang benar-benar mengerti perikanan.

"Itulah perlunya institusi pendidikan yang visi dan misinya adalah menghasilkan sumberdaya manusia (SDM) tangguh untuk pengelolaan perikanan tangkap Indonesia. Departemen PSP sebagai leader dalam institusi pendidikan bidang perikanan tangkap merupakan institusi penghasil SDM perikanan tangkap tertua di Indonesia yang menjadi acuan bagi program studi sejenis di Indonesia," ujarnya. **(IR/Zul)**

ERC IPB University Bahas Kebakaran Hutan atau Lahan dan Hubungannya dengan Emisi Gas Rumah Kaca



Kerusakan lingkungan di tengah tingginya konversi lahan hutan mengisyaratkan sebuah makna bahwa terdapat tugas perbaikan lingkungan oleh manusia. Salah satunya adalah kebakaran hutan yang memiliki andil dalam mendukung terjadinya bahaya gas rumah kaca.

Hal ini mendorong Environmental Research Center (ERC) IPB University untuk menyelenggarakan Webinar "Kebakaran Hutan/Lahan dan Emisi Gas Rumah Kaca", (26/6) melalui aplikasi Zoom dan Live Streaming Youtube Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University.

Deputi Kepala PPLH IPB University, Prof Dr Yusli Wardiatno dalam sambutannya mengatakan bahwa salah satu fungsi pusat studi di IPB University adalah mengedukasi. Webinar ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk belajar kepada dua ahli mengenai kebakaran hutan dan korelasinya terhadap gas rumah kaca.

Hadir sebagai narasumber, dosen IPB University yang merupakan Guru Besar di Fakultas Kehutanan, Prof Dr Bambang Hero Saharjo. Dalam paparannya, Prof Bambang

mengatakan bahwa emisi gas rumah kaca yang timbul akibat kebakaran yang terjadi di permukaan lahan gambut dan kebakaran gambut dapat dikendalikan dengan cara mengelola gambut dengan benar sesuai peruntukannya. Terutama jika dikaitkan dengan pengaturan tinggi muka air yang sebenar-benarnya. "Upaya pencegahan harus dikedepankan dan tidak hanya sebagai pemanis tetapi benar-benar diterapkan," ujarnya.

Prof Bambang menambahkan bahwa perhitungan emisi gas rumah kaca dari kebakaran gambut dapat dihitung dengan benar, berdasarkan hasil penelitian yang lengkap dan terintegrasi dengan benar dan menggunakan peralatan yang benar dan tepat.

Sementara itu, menurut Dr Haruni Krisnawati, Peneliti Ahli Utama Badan Litbang dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), memonitoring kebakaran hutan membutuhkan pemahaman yang tepat terhadap proses kebakaran yang terjadi pada forest system. "Apakah kebakaran adalah sebuah ecological change agent, disturbance, a forest management tool. Atau sebagai sebuah proses yang berasosiasi dengan lahan konversi," jelasnya.

Ada perbedaan pendekatan dan objektivitas dalam melakukan monitoring. Yakni melalui pre fire (sistem peringatan dini), active fire (keterhubungan antara data satelit) dan post fire (estimasi area yang terbakar).

"Metode kalkulasi emisi gas rumah kaca akibat kebakaran sudah tersedia, tinggal bagaimana Indonesia bisa mengimprove atau meningkatkan akurasi dari pelaporan gas rumah kaca terutama dari sektor kebakaran," tutupnya. **(**/Zul)**

Praktisi Laboratorium Harus Rajin Cek Kesehatan, Minimal Satu Tahun Sekali

PROGRAM STUDI ANALISIS KIMIA SEKOLAH VOKASI IPB

Pergoptimalan Peranan K3 di Laboratorium Kimia dalam Era Normal Baru

*FREE E-CERTIFICATE

KUOTA TERBATAS !!

SABTU, 27 Juni 2020 09.00 - 12.00

LIVE at **zoom**

ID : 839 8682 3495
Password : svipb

NARASUMBER

- Prof. Ismunandar, B.Sc, Ph.D.**
Staf Ahli Bidang Relevansi dan Produktivitas Kementerian Riset/Badan Riset dan Inovasi Nasional
- Dr. Ir. Sugeng Riyono, MPhil.**
Penasehat Senior LK3, Instruktur Manajemen K3LL/HSE
- Rachmad Iswahjudi, SKM**
Vice Chairman of East Java Indonesian Safety Expert Association
Anggota Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Timur
Dosen Fakultas Vokasi Keselamatan & Kesehatan Kerja Universitas ANGER

OPENING SPEECH

- Dr. Ir. Arief Darjanto, M.Ec.**
Dekan Sekolah Vokasi IPB

MODERATOR

- Armi Wulanawati, S.Si, M.Si.**
KAPRODI Analisis Kimia Sekolah Vokasi IPB

HOST

- Ika Resmelliana, S.Hut, M.Si.**
SEKPRODI Analisis Kimia Sekolah Vokasi IPB

Co-HOST

- Dr. Farida Laila, M.Si.**
Wina Yulianti, S.Si, M.Si.
Dosen & Penanggung jawab Lab Kimia Sekolah Vokasi IPB

LINK PENDAFTARAN :
<https://bit.ly/webinarK3>

CONTACT PERSON :
 M. Rival Firdaus (085720656992)

Himpunan Mahasiswa Analisis Kimia Vokasi (Aromatik) IPB University menyelenggarakan webinar dengan mengusung tema

“Pergoptimalan Peranan K3 di Laboratorium Kimia dalam Era Normal Baru” (27/6). Webinar ini menghadirkan Prof Ismunandar, Staf Ahli Bidang Relevansi dan Produktivitas Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemristek/BRIN), Dr Sugeng Riyono (Penasehat Senior LK3 dan Instruktur Manajemen K3LL/HSE) dan Rachmad Iswahjudi, SKM, Vice Chairman of East Java Indonesian Safety Expert Association yang juga Anggota Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Dr Arief Darjanto selaku Dekan Sekolah Vokasi IPB University mengapresiasi kegiatan ini sebagai strategi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Ia juga berharap melalui kegiatan ini akan muncul dan tercapai learning outcome yang bermanfaat bagi para peserta.

Pada kesempatan ini, Rachmad Iswahjudi membahas seputar “Penanganan dan Penyimpanan Bahan Kimia Berbahaya dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Ia mengawali penjelasan dengan memberikan contoh kasus unsafety moment yaitu kecelakaan laboratorium kimia yang terjadi di Indonesia dan China.

Rachmad menyebutkan faktor behavioral atau perilaku menjadi hal utama yang melatarbelakangi sebagian besar kecelakaan kerja. Ia juga menjelaskan tentang pengendalian bahaya, prinsip dasar tempat penyimpanan serta pengaruh B3 terhadap kesehatan. “Yang tidak kalah penting yaitu, seseorang yang bekerja dengan bahan kimia harus melakukan pengecekan kesehatan secara berkala minimal satu tahun sekali,” terangnya.

Dalam paparannya, Prof Ismunandar, memberikan rujukan Buku Keselamatan dan Keamanan Laboratorium Kimia oleh National Academy of Sciences. Buku tersebut memuat beberapa hal penting terkait Keselamatan dan Keamanan Laboratorium Kimia, diantaranya adalah personal protection dan housekeeping.

Prof Ismunandar juga menjelaskan bagaimana keselamatan menjadi lebih mudah, murah, aman dan menghemat waktu dengan memperhatikan bahaya fisik dan ergonomis, bahaya radiasi serta mengenal zat-zat kimia khusus. Mengaitkan dengan Era Normal Baru, Prof Ismunandar menekankan pentingnya alat pelindung diri (APD) seperti kacamata pengaman dan masker selama kegiatan di laboratorium. “Kesehatan tidak hanya perihal jasmani tetapi juga rohani atau mental. Pekerjaan di laboratorium, penelitian dan kegiatan praktikum harus senantiasa menerapkan 3M. Yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan sesering mungkin,” tutupnya.

Sementara itu, Dr Sugeng Riyono yang membawakan materi bertajuk Prosedur K3-Pengenalan Bahaya dan Penilaian Risiko, memaparkan prinsip dasar pencegahan kecelakaan kerja dimulai dari identifikasi masalah, penilaian risiko, mengendalikan risiko, pelaksanaan tindakan hingga pelaksanaan pengawasan di laboratorium.

Dr Sugeng juga menjelaskan mengenai pentingnya pengenalan bahaya untuk menghindari unsafe action. Menurutnya, kita perlu membuat peraturan penandaan yang mengikuti standar keselamatan kerja. Maka fasilitas dan kondisi lingkungan menjadi hal yang penting untuk keberlangsungan laboratorium. “Hal kecil kalau kita biarkan terus menerus akan menjadi hal yang fatal,” ujarnya. **(RMY/Zul)**

Masa Pandemi COVID-19, Sebanyak 40 Persen Wanita Tidak Gunakan Makeup



Dalam rangka memasuki era new normal, program studi (prodi) Komunikasi Sekolah Vokasi (SV) IPB University mengadakan webinar bertajuk "Marketing Communication: Perkembangan Produk Fashion dan Kecantikan pada Era New Normal" (27/6). Webinar diikuti lebih dari 200 peserta dan digelar melalui aplikasi Zoom dan Live Streaming Youtube.

Dalam webinar ini, Ayumi Fitriani Gunawan, MSi selaku Dosen Prodi Komunikasi SV menjelaskan pentingnya communication marketing untuk menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen secara langsung atau tidak langsung tentang suatu produk. Di masa pandemi hingga new normal ini, perusahaan tentu mengalami pergeseran saluran komunikasi seperti saluran komunikasi fisik menjadi virtual.

Budi Khairunnisa Solekha ST selaku Market Development Executive Wardah Provinsi Banten menjelaskan strategi marketing komunikasi yang dilakukan Wardah agar tetap eksis meski di tengah pandemi dan era new normal ini. Dalam data yang ditunjukkannya, hanya 12 persen orang yang masih menggunakan makeup walaupun dalam masa

staycation, 40 persen tidak lagi menggunakan makeup dan 46,4 persen kadang-kadang menggunakan makeup.

Tentu hal demikian memiliki tendensi eksisme produk kecantikan seperti Wardah akan menurun drastis. Namun, Khairunnisa menerangkan bahwa Wardah terus berusaha menjalin komunikasi dengan strategi-strategi yang membuat tetap relevan dengan kondisi masyarakat. Strategi komunikasi yang dilakukan seperti memberi empati pada konsumen, mengeluarkan edukasi yang tepat kala staycation, memberikan alasan-alasan kepada konsumen untuk tetap menggunakan produk, dan memberikan layanan secara online kepada konsumen.

"Kita ingin masyarakat tahu, bahwa Wardah bersama dengan mereka dalam menghadapi pandemi ini," tutupnya.

Di sisi lain, Aghnia An'umillah, SE selaku CEO/Founder Jilbrave memperkenalkan produk miliknya. Jilbrave ialah suatu brand produk fashion top to toe yang menargetkan anak muda sebagai pasar mereka. Kunci keberhasilan Jilbrave di dalam pasar produk sejenis lainnya terletak pada mindset bisnis online yang dimulai dari marketing communication.

"Buka toko secara online itu seperti buka toko di tengah hutan belantara. Tanpa aktivitas selain posting, toko akan sepi. Bisnis di IG, FB, TikTok, YouTube itu berarti kita sedang bisnis di atas bisnis orang lain. Kita harus paham sebuah platform itu ingin apa sih dari usernya? Bisnis online adalah soal memenangkan layar handphone dan jempol netizen. Strategi komunikasi marketing yang saya gunakan adalah dengan komposisi 20 persen lisan, 20 persen tulisan dan 60 persen visual. Komunikasi yang dekat dengan konsumen juga sangat menentukan keberhasilan penjualan," ujarnya. **(Gre/Zul)**

Peran Keluarga Menjadi Kunci Utama di Era Pandemi COVID-19 dan New Normal



Keluarga merupakan institusi sosial terkecil di masyarakat yang mempunyai peran sangat besar dalam pembentukan sumberdaya manusia berkualitas. Keluarga adalah institusi pertama dan utama dalam mendidik, melindungi serta memelihara anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan nilai-nilai keluarga, norma masyarakat dan agama yang dianut sehingga dihasilkan generasi tangguh.

Generasi tangguh inilah yang akan menjadi calon pemimpin bangsa dan pemegang roda pembangunan di masa akan datang. Maka tidak salah kalau muncul kalimat yang indah "institusi keluarga merupakan pilar dan pondasi bangsa", tapi kalimat itu juga sekaligus bisa mengkhawatirkan kita semua apabila pilar dan pondasi keluarga tidak kuat. Apa yang akan terjadi dengan negara kita? Tentunya jika keluarga tidak memiliki pilar dan pondasi yang kuat maka negara tidak akan mempunyai landasan yang kuat alias keropos.

Menurut Ketua Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK), Fakultas Ekologi Manusia (Fema), IPB University, Dr Tin Herawati, pandemi COVID-19 telah mempengaruhi sistem lingkungan terbesar (makrosistem) yang tentunya sangat berdampak pada lingkungan terkecil (mikrosistem), yaitu keluarga. Perubahan demi perubahan dihadapi oleh keluarga pada sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan dan sebagainya sehingga memengaruhi kehidupan seluruh anggota keluarga.

Pengaruh sistem lingkungan terhadap keluarga bisa mengandung faktor risiko dan faktor protektif. Faktor risiko adalah faktor yang dapat mengancam kesejahteraan keluarga sedangkan faktor protektif merupakan faktor yang mendukung keluarga untuk menjadi kuat dan bijaksana.

Pada masa pandemi COVID-19, keluarga menjadi isu yang banyak diperbincangkan, terutama jumlah penderita COVID-19 sampai jumlah korban meninggal yang selalu diinformasikan di berbagai media. Adanya penderita dan korban meninggal dari anggota keluarga akibat COVID-19 merupakan salah satu contoh kasus dari faktor risiko bagi keluarga.

"Jumlah penderita dan korban yang semakin banyak memicu kekhawatiran semua pihak terhadap dahsyatnya penularan COVID-19. Hal inilah yang memicu pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang intinya untuk melindungi anggota keluarga dari penularan COVID-19 seperti penutupan sekolah, physical distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Work from Home (WFH). Adanya kebijakan-kebijakan tersebut, isu keluarga muncul lagi, terutama isu tidak stabilnya pekerjaan yang dimiliki keluarga. Pekerjaan yang tidak stabil inilah yang memicu munculnya berbagai permasalahan lainnya dalam keluarga," ujarnya.

Isu keluarga menjadi perbincangan kembali sehingga banyak pihak yang tertarik melakukan penelitian-penelitian terkait kehidupan keluarga di masa pandemi COVID-19. Ada kekonsistenan dari hasil-hasil penelitian tersebut bahwa ketahanan ekonomi keluarga menjadi faktor yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19. Menurunnya ketahanan ekonomi keluarga inilah yang akan berdampak pada ketahanan sosial dan psikologis keluarga.

Selain memberikan faktor risiko pada keluarga, pandemi COVID-19 juga memiliki faktor protektif yang ditunjukkan oleh kebersamaan dan komunikasi keluarga yang semakin baik serta saling mendukung antar anggota keluarga. Nilai-nilai inilah yang harus terus ditingkatkan sehingga keluarga dan individu di dalamnya dapat mengembangkan mekanisme adaptasi dan pemecahan masalah yang bertujuan untuk melindungi keluarga dari situasi krisis dan tekanan.

Mengingat dampak pandemi COVID-19 begitu luas ke berbagai sektor maka pemerintah dan semua pihak terus bekerja keras untuk menekan dampak tersebut.

Keberhasilan pemerintah dalam menekan dampak pandemi COVID-19, tidak hanya memberlakukan kebijakan-kebijakan tetapi intinya bagaimana kebijakan tersebut bisa dijalankan dengan baik oleh semua pihak.

“Kembali lagi, keluarga menjadi sentral utama dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut. Kepatuhan anggota keluarga dalam melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sangat berperan besar dalam menekan dampak pandemi COVID-19. Keluarga berperan penting melindungi, mensosialisasikan dan mengajarkan anggota keluarganya untuk selalu cuci tangan, memakai masker jika keluar rumah, tidak berkerumun dan tidak banyak ke luar rumah. Oleh karena itu penguatan fungsi keluarga sebagai fungsi perlindungan, fungsi sosial dan pendidikan harus terus ditingkatkan dalam upaya menekan dampak pandemi COVID-19,” terangnya.

Seiring berjalannya waktu, di sejumlah negara termasuk Indonesia, mulai melonggarkan kebijakan terkait mobilitas. Misalnya relaksasi PSBB, dimulainya work from office (WFO) dan dibukanya pusat perbelanjaan dan tempat wisata. Di sisi lain, COVID-19 masih terus mengancam dan korban jiwa pun terus bertambah. Kondisi itulah yang menuntut kita semua untuk menerapkan pola hidup baru. Yaitu perubahan perilaku untuk menjalankan aktivitas normal yang disertai dengan menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan untuk mencegah penularan COVID-19.

Inilah yang disebut memasuki kehidupan di era new normal atau normal baru. Perubahan perilaku inilah yang menjadi kunci sukses dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan kekonsistenan dalam menerapkan perilaku baru menjadi kunci sukses dalam memasuki normal baru. Oleh karena itu dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut tentunya pemerintah sangat menghimbau untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19.

“Kembali lagi keluarga menjadi sentral utama dalam keberhasilan menuju era normal baru. Pada saat ada relaksasi PSBB, anggota keluarga ramai keluar rumah untuk pergi ke pasar, pusat-pusat perbelanjaan, berkunjung ke tempat-tempat rekreasi sehingga sudah

kelihatan macet kembali di perjalanan. Seolah-olah tidak terjadi pandemi COVID-19, yang akhirnya pemandangan yang terlihat bukan new normal tetapi back to normal artinya kembali ke normal seperti kondisi sebelumnya. Kondisi inilah yang menjadi pemicu penambahan kasus baru COVID-19 di era new normal,” imbuhnya.

Meskipun pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, bukan berarti kita sudah bebas dari ancaman penularan COVID-19, sehingga semua pihak bebas ke luar rumah tanpa menggunakan protokol kesehatan yang dianjurkan. Pada kondisi inilah peran keluarga sangat penting untuk selalu mengingatkan anggota-anggota keluarganya supaya patuh dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Keluarga merupakan satu-satunya lembaga sosial yang diberi tanggung jawab pertama kali untuk mengenalkan tingkah laku yang dikehendaki, mengajarkan penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya dan penyesuaian diri dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Keluarga merupakan salah satu agen sosialisasi yang paling penting dalam mengajarkan anggota-anggotanya mengenai aturan-aturan yang diharapkan oleh masyarakat. Kemampuan keluarga mengendalikan individu secara terus menerus, merupakan kekuatan sosial yang tidak dapat ditemukan pada lembaga lainnya. Oleh karena itu kepatuhan-kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan COVID-19 sangat dipengaruhi oleh kekuatan sosial dalam keluarga.

Keluarga memang unit terkecil dalam masyarakat, tetapi keluarga memiliki peran besar dalam keberhasilan menekan dampak pandemi COVID-19 dan kesuksesan menuju era normal baru. Oleh karena itu dalam rangka Hari Keluarga Nasional, kita semua diingatkan kembali peran pentingnya sebuah keluarga. Tidak hanya berperan penting dalam mewujudkan SDM berkualitas tetapi juga menjadi kunci utama dalam menekan wabah pandemi COVID-19 dan kunci utama dalam kesuksesan memasuki era normal baru.

“Di masa pandemi dan memasuki era normal baru, keluarga harus memperkuat fungsinya supaya mampu menjadi pilar dan pondasi yang kuat untuk negara Indonesia tercinta,” tandasnya. (**/Zul)

Pandemi COVID-19, Rumah Tangga dengan Penghasilan Rendah Lebih Banyak Belanja Pangan

WEBINAR SV-IPB SERIES 4

One Health for Food Safety, Food Security, and Sustainable Food System in the Era of New Normal

Speaker
Prof. Dr. drh. Srihadi Agungpriyono, Ph.D., P.A.Vet.(k.)
Dekan Fakultas Kedokteran Hewan IPB

Speaker
Prof. Dr. Ir. Sumiati, M.Sc
Dekan Fakultas Peternakan IPB

Speaker
Prof. Dr. Ir. Ujang Sumarwan, M.Sc
Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB

Moderator
Dr. Ir. Bagus P Purwanto, MAgr.
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan SV-IPB

Date & Time:
JUMAT
19 JUNI 2020
13.30-15.30

FORM REGISTRASI:
bit.ly/reg4svipb

Pada masa transisi era New Normal, berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak sebagai langkah antisipasi dampak dari pandemi COVID-19. Mulai dari pencegahan

penularan atau penyebaran seperti penyemprotan cairan disinfektan, kampanye penggunaan masker secara masif, penerapan berbagai protokol kesehatan juga sosialisasi dan himbauan hingga pemberian bantuan sosial kemanusiaan.

Dalam menyongsong New Normal sebagai tatanan kehidupan baru untuk melawan COVID-19, kita dituntut untuk mengubah gaya dan pola hidup baik dari segi kebersihan dan kesehatan. Selain itu, penguatan ketahanan, keamanan dan sistem keberlanjutan di bidang pangan menjadi salah satu faktor penting demi keberlangsungan roda perekonomian dan kehidupan. Untuk itu, Sekolah Vokasi (SV) IPB University berusaha mengkaji dan membahas lebih lanjut dalam webinar dengan Topik One Health for Food Safety, Food Security and Sustainable Food System in the Era of New Normal, (19/6).

Pada kesempatan ini, Prof Dr Ujang Sumarwan, Dekan Fakultas Ekologi Manusia (Fema), IPB University menjelaskan secara umum bagaimana masa pandemi COVID-19 membuat perilaku konsumen menjadi berubah sebagai akibat penyesuaian diri dari kondisi yang sedang dihadapi. Statistik menunjukkan bahwa rumah tangga

yang memiliki pendapatan rendah mengeluarkan uang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan pangan dibandingkan dengan rumah tangga berpenghasilan tinggi. Pengeluaran untuk pangan mencapai lebih dari 50 persen. Hal yang sama juga terjadi pada masyarakat pedesaan yang memiliki pengeluaran lebih banyak untuk pangan dibandingkan masyarakat perkotaan.

“Masyarakat lebih banyak mengeluarkan uangnya untuk pangan dan minuman siap saji. Betapa pentingnya keamanan pangan dari perspektif konsumen terutama di era pandemi sekarang ini. Oleh karenanya penting bagi produsen maupun aktor tataniaga untuk memperhatikan keamanan pangan sehingga produknya masih terus diminati oleh konsumen. Konsumen saat ini lebih memilih jasa pesan antar dibandingkan harus makan di tempat. Kolaborasi antara jasa kuliner dan transportasi online dapat memberikan benefit kepada kedua belah pihak. Namun demikian, terdapat potensi masalah pada saat menggunakan jasa pesan antar yang dikaitkan dengan keamanan pangan. Oleh karenanya, semua aktor dalam rantai tataniaga perlu memperhatikan keamanan pangan pada produk yang dijual sehingga produknya semakin diminati oleh konsumen dan kesehatan konsumen menjadi lebih terjaga.

Sementara itu, Prof Dr drh Srihadi Agungpriyono, Dekan Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) IPB University menjelaskan tentang pentingnya pendekatan “one health” dalam meningkatkan sistem pangan yang aman dan berkelanjutan. Prof Srihadi menggarisbawahi pentingnya pangan untuk kehidupan manusia. Namun, pangan yang sehat dan berkelanjutan memiliki berbagai tantangan ke depan. Antara lain pertumbuhan manusia yang sangat cepat, perubahan lingkungan dan penyakit-penyakit menular. Tentunya faktor-faktor tadi berakibat pada ketersediaan dan keamanan pangan ke depan. Pangan yang aman, sehat, utuh dan halal akan berkontribusi pada kesehatan manusia yang mengonsumsinya. “Di dunia internasional, jargon “one health” terus didengungkan apalagi melihat kondisi pandemi saat ini. Kita tidak lagi diharapkan melihat pandemi sebagai sesuatu yang terpisah-pisah (fragmented) tetapi perlu dilihat secara lebih komprehensif. Pendekatan “one health” melihat secara menyeluruh mengenai kesehatan manusia, kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan. Apabila penerapan “one health” terus didengungkan dan dilaksanakan sesuai dengan peran masing-masing maka pandemi dapat dicegah atau dapat diatasi dengan lebih baik. Salah satunya dengan cara memotong rantai penyebaran penyakit menular,” ujarnya.

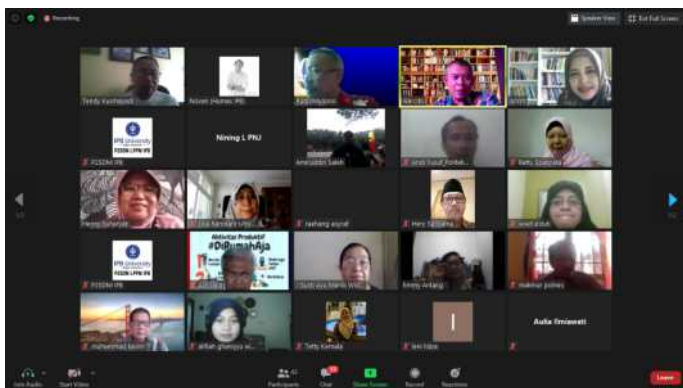
Prof Dr Sumiati, Dekan Fakultas Peternakan IPB University juga menjelaskan mengenai "Healthy Feed for Healthy Food". Salah satu implementasi dari "one health" yaitu bagaimana ternak diberikan pakan yang sehat dan aman sehingga berkontribusi pada pangan yang sehat. Contohnya pada komoditi unggas. Dengan pakan yang aman dan bermutu, produksi unggas dapat meningkat sehingga menghasilkan keamanan pangan yang baik. Tentunya dalam jangka panjang dapat berperan dalam meningkatnya kesehatan manusia. Pakan dapat dikatakan bermutu apabila memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain bahan baku, standar kebutuhan nutrisi ternak, teknik pengolahan, formulasi dan teknik pencampuran serta kontaminan. Di Indonesia sendiri, beberapa kebijakan telah difokuskan untuk menjaga pakan yang sehat. Seperti pengembangan mutu pakan, pengembangan sumberdaya manusia, pengawasan mutu pakan, pengembangan laboratorium pakan dan pengembangan regulasi di bidang

pakan. Dengan pakan yang sehat atau bermutu maka dalam jangka panjang kualitas kesehatan manusia dapat meningkat," imbuhnya.

Di akhir sesi webinar, Dekan SV, Dr Arief Darjanto menyampaikan concluding remarks dengan menguraikan tantangan bersama adalah bagaimana mempromosikan paradigm of thinking. "Sebagai contoh selama ini upaya kita hanya fokus ke volume bukan values. Jadi harus ada paradigm of thinking from volume to values karena value added ada dihirilisasi, jangan sampai kita terlalu banyak berpikir di volume. Dalam konteks value addition ke depan, saya setuju bahwa memang ke depan bagaimana kita mempromosikan atribut yang lebih penting dalam sistem pangan kita. Yang pertama food safety, tentu one health policy yang merupakan upaya global yang penting. Misalnya pada food safety itu dalam konteks kesehatan bagaimana kita mengurangi atau melarang sama sekali antibiotik dan juga monitoring yang sangat ketat tentang bahaya salmonela dan juga seperti tadi," ujarnya. **(red-PS/WB/Zul)**

Prof Pudji Muljono Berbagi Tips Penyusunan Proposal Penelitian yang Berkualitas



Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban kampus untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dosen dan mahasiswa diharapkan bisa membantu masyarakat dalam bentuk pendampingan program. Tentunya kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan potensi dan masalah yang sedang dihadapi masyarakat.

"Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat oleh dosen membutuhkan perencanaan yang tepat. Penyusunan proposal kegiatan adalah tahap awal untuk merumuskan masalah dan potensi untuk merencanakan program yang sesuai," ungkap Prof Dr Pudji Muljono, dosen IPB University yang merupakan pakar di bidang pengembangan masyarakat dalam acara Pelatihan

Penyusunan Proposal yang digelar Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia (P2SDM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IPB University, (27/6). Kegiatan ini diikuti 41 dosen dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Prof Pudji Muljono sebagai pemateri menyebutkan bahwa proposal akan menjadi panduan saat kegiatan berlangsung. Selain itu proposal juga ditujukan untuk pangajuan dana ke instansi swasta ataupun negeri. Namun, banyak sekali proposal tidak berhasil didanai karena kurangnya kualitas proposal.

"Banyak proposal gagal dalam pendanaan karena kurangnya analisis dalam pemecahan masalah. Selain itu, penerapan metode yang kurang tepat dalam memecahkan masalah juga menjadi alasan. Banyak proposal membawa inovasi namun tidak menjawab permasalahan yang ada di masyarakat," tambahnya.

Proposal kegiatan sebaiknya diajukan oleh tim yang terdiri dari lintas disiplin. Kolaborasi dari bidang keilmuan yang berbeda memiliki nilai pemecahan masalah yang lebih baik di masyarakat. Penting juga untuk menguatkan masyarakat dengan pembentukan lembaga, penguatan serta perluasan jejaring dan mitra. **(NA/Zul)**

Wisatawan di Era New Normal Lebih Kedepankan Keamanan dan Kesehatan

Topik
Kebangkitan agro-ecotourism di era tatanan normal baru: Perspektif sosial ekonomi, bisnis, dan ekologis

Opening Speech
Dr. Ir. Arief Darjanto, M.Ec
Dekan Sekolah Vokasi IPB University

Speker
Dr. Frans Teguh, MA
Staf Ahli Bidang Pembangunan Keberlanjutan dan Konservasi & Plt Deputy Sumber Daya dan Kelembagaan Kememparekraf

Speker
Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, M.Sc F.Trop
Dekan Fakultas Kehutanan IPB University

Speker
Prof. Dr. ir. Anas Miftah Fauzi, M.Eng
Dekan Sekolah Pascasarjana IPB University

Moderator
Dr. Ir. Sulistijorini, MSI
Kepala Divisi Ekosistem, Lingkungan, dan Komunikasi Terapan SV-IPB University

Jumat
26 Juni 2020
13.30-15.30 WIB

Registrasi:
bit.ly/web5svipb
Meeting ID: 862 8008 6438
Password : svipb

Zoom

sekolahvokasipb vokasipb sekolahvokasipb www.sv-ipb.ac.id sv-ipb university

Dalam rangka memasuki era tatanan normal baru, Sekolah Vokasi (SV) IPB University mengadakan webinar series ke-5 dengan tajuk "Kebangkitan Agro-ecotourism di Era Tatanan Normal Baru: Perspektif Sosial Ekonomi, Bisnis dan Ekologis" (26/6). Pada webinar tersebut, Dekan SV IPB University, Dr Arief Daryanto menekankan pada esensi ecotourism di era tatanan normal baru. Ia berharap, melalui webinar ini para peserta mendapat insight baru sehingga mampu bersama-sama mengkompromikan aspek sosial ekonomi, bisnis dan ekologis demi terciptanya ekowisata berkelanjutan (sustainable ecotourism).

Dalam webinar ini, Dr Frans Teguh, Staf Ahli Bidang Pembangunan Keberlanjutan dan Konservasi yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Deputy Sumber Daya dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kememparekraf) menjelaskan bahwa tren pariwisata akan mengalami perubahan. Pandemi COVID-19 menimbulkan disrupsi sehingga menyebabkan wisatawan lebih mengedepankan aspek keamanan dan kesehatan. Maka dari itu pemerintah, pelaku usaha dan stakeholder terkait harus mampu beradaptasi atau menciptakan inovasi sebagai respon terhadap perubahan.

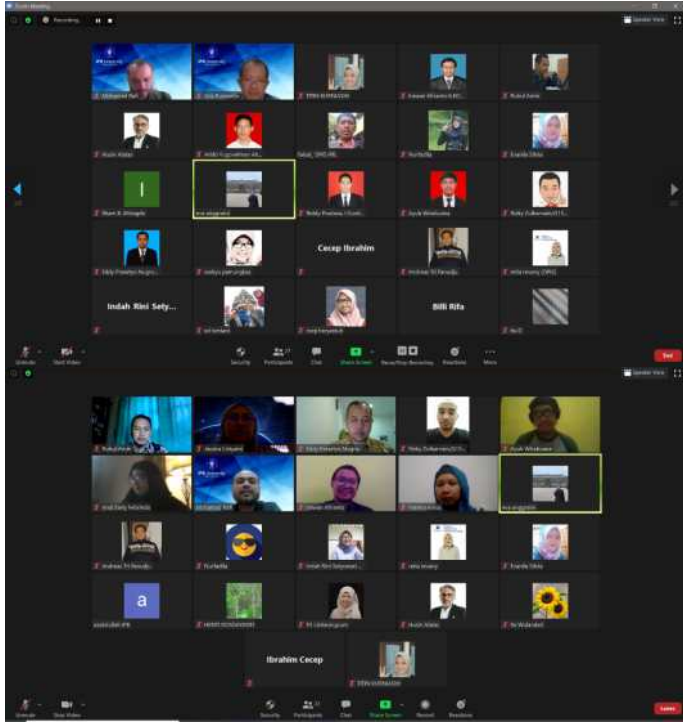
"Mega Trends Normal Baru yang akan mewarnai pariwisata meliputi staycation, hommy, interactive relationship and activities, destinasi jarak pendek atau dekat, perjalanan domestik, pilihan safe, kebersihan, kesehatan dan destinasi yang aman, health, sensitivitas terhadap kebersihan, protokol baru, keberlanjutan dan tanggung jawab wisatawan, reliance dan pengalaman pengetahuan setempat, kearifan dan literasi masa lalu, pengembangan penciptaan nilai otentik produk, ekosistem digital, peniadaan pengiriman layanan pribadi dan jarak, niche market, voluntourism, edukasi, kedermawanan, penikmat alam terbuka atau semesta, dan healing ecotourism. Virtual is the new reality. Value is the base of new global. Reliance is indeed the sustainability," tuturnya.

Sementara itu, Prof Dr Anas Moftas Fauzi, Dekan Sekolah Pascasarjana IPB University membahas agro-edu-ecotourism yang berkelanjutan. Ia menekankan perlunya edukasi dalam ekowisata untuk meminimalkan dampak pada lingkungan. Contohnya adalah penggunaan warna alam untuk kerajinan batik di Kampung Alam Mulon Gunungpati tanpa merusak alam itu sendiri serta perilaku para wisatawan yang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap kebersihan tempat wisata yang dikunjungi.

Sementara Dr Rinekso Soekmadi, Dekan Fakultas Kehutanan IPB University lebih menyoroti adaptive ecotourism sebagai wujud transformasi ekowisata di era tatanan normal baru. Ia menegaskan bahwa ekowisata di era tatanan baru ini bukan wisata biasa. Karena dalam adaptive ecotourism akan muncul perubahan-perubahan seperti online base untuk promosi, pemasaran dan ticketing, implikasi kunjungan terencana termasuk edukasi dan interpretasi yang diperlukan, wisata sambil bekerja dan belajar, pematuhan protokol kesehatan, panduan dari interpretator di tempat wisata, pembatasan jumlah wisatawan dan partisipasi dari masyarakat dan pemerintah setempat.

"Sehingga dengan adaptasi demikian, ekowisata tetap eksis dan berkelanjutan meski dalam era tatanan baru," ujarnya. **(Gre/Zul)**

DPIS IPB University Kembali Gelar Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Bidang Teknik dan Informatika



Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis (DPIS) IPB University kembali mengadakan pelatihan penulisan artikel ilmiah, dengan spesifikasi untuk bidang ilmu Teknik dan Informatika. Pelatihan daring yang dilaksanakan pada 23-24/6 ini merupakan batch ke-10.

Pelatihan diikuti oleh 29 peserta, dengan rincian 23 peserta merupakan mahasiswa pascasarjana IPB University dan enam diantaranya adalah dosen. Syarat keikutsertaan peserta adalah sudah memiliki naskah dalam bahasa Inggris dengan target jurnal terindeks Scopus minimal Quartile 3 (Q3). Dalam pelatihan ini, DPIS menghadirkan tiga reviewer dari komite publikasi IPB University, yaitu Prof Dr Y Aris Purwanto, Prof Dr Husin Alatas dan Dr Farit M Afendi.

Dalam sambutannya, Dr Eva Anggraini selaku Direktur Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis mengatakan bahwa pelatihan ini dilakukan dalam upaya meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi internasional bereputasi serta sitasi, baik bagi dosen maupun mahasiswa Pascasarjana di bidang Teknik dan Informatika.

Dalam paparannya yang berjudul *How to Write a Successful and Attractive Manuscript in Engineering and Informatics Field*, Prof Y Aris Purwanto menyampaikan pentingnya memiliki semangat internal untuk menulis dan

memberikan karya terbaik. Ada enam hal yang menjadi penekanan dari paparan Prof Aris yakni alasan atau ide mengapa makalah ilmiah perlu diterbitkan, kebaruan yang diberikan dalam makalah ilmiah tersebut, kesimpulan makalah yang didukung oleh data dan kajian yang kuat, manuskrip ilmiah yang ditulis sesuai dengan tujuan jurnal yang dituju, tulisan dalam manuskrip terorganisasi dengan baik. Data, tabel, gambar serta data pendukung sesuai dan tersusun dengan baik sesuai poin yang menjadi fokus dalam manuskrip. "Penulisan karya ilmiah hendaknya memenuhi unsur-unsur berupa *good tittle, good structure, dan good writing*," jelasnya.

Sementara itu, Prof Husin Alatas dengan materi *Tips and Tricks on Choosing the Right Journal, Responding to Comments from Reviewers and Corresponding with Editors* menekankan pada tiga poin. Yakni tujuan riset dan diseminasi hasilnya, pentingnya publikasi ilmiah dan kondisi publikasi ilmiah di Indonesia.

Menurutnya, publikasi ilmiah adalah langkah terakhir dari sebuah aktivitas penelitian yang sudah lengkap dan merupakan pertanggungjawaban moral peneliti kepada komunitasnya.

Prof Husin Alatas juga menekankan substansi penting publikasi ilmiah. Diantaranya publikasi ilmiah menyediakan hasil riset yang disimpan secara permanen, hasil riset memiliki dampak bagi perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya, peneliti perlu melakukan publikasi dengan jujur, akurat, lengkap, dan seimbang. "Peneliti harus menghindari bentuk laporan yang ambigu dan menyesatkan. Publikasi ilmiah pada hakikatnya mencerminkan bagaimana kemampuan sebuah bangsa dalam berkontribusi sebagai produsen ilmu pengetahuan," tegas Prof Husin Alatas.

Menurut salah satu peserta, Dr Andi Early Febrinda, dosen dan peneliti dari program studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan, Sekolah Vokasi IPB University, pelatihan ini sangat bermanfaat dalam memperbaiki manuskrip yang akan dikirim ke jurnal internasional.

"Selain itu, pelatihan ini juga dapat meningkatkan rasa percaya diri saya untuk mengirimkan hasil riset ke jurnal bereputasi," tambahnya. (**/Zul)

Mahasiswa Harus Lebih Peka, Peduli, dan Kreatif untuk Terjun ke Masyarakat



Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia (P2SDM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University mendorong mahasiswa Indonesia untuk lebih peka, peduli dan kreatif. Untuk itu, P2SDM menggelar webinar “Kampus Merdeka, Pengabdian Mahasiswa dan Bina Desa, (26/6) yang dihadiri oleh ratusan peserta dari kalangan mahasiswa dan dosen dari seluruh Indonesia.

Dalam paparannya, Dr Yannefri Bakhtiar, Kepala Divisi Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat, P2SDM IPB University menyampaikan bahwa generasi muda menjadi tumpuan harapan dan menjadi dasar kekuatan bagi Indonesia di masa depan. Generasi X dan Y diharapkan mampu cepat beradaptasi dengan kondisi yang sangat cepat berubah.

“Mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan, bisa mentransfer ilmu dan gagasan, juga semangat kepada masyarakat sekitar. Dengan kondisi saat ini masyarakat sangat banyak membutuhkan pencerahan melalui pemberdayaan dan bina desa,” ujarnya.

Melalui Kampus Merdeka, Merdeka Belajar yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, mahasiswa diberi kesempatan yang luas untuk berinteraksi dengan

kehidupan nyata. Dengan begitu, mahasiswa akan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat, pemetaan masalah dan problem solving yang bisa dilakukan bersama masyarakat. Untuk kegiatan ini, mahasiswa diberi peluang pendanaan dengan mengajukan proposal Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D).

“Dengan adanya kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar maka belajar tidaklah hanya di ruang kelas, ataupun praktikum di laboratorium saja. Tetapi juga dapat dilakukan di desa, di masyarakat, industri, tempat-tempat kerja, tempat-tempat pengabdian, pusat riset, pasar dan lainnya. Mahasiswa diberi ranah untuk menciptakan hal-hal kreatif, memunculkan gagasan-gagasan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

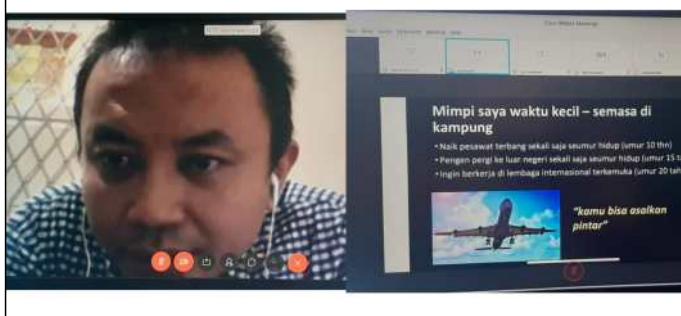
Lebih lanjut Dr Yannefri sebagai Direktur Kampus Desa menjelaskan, di desa banyak sekali potensi sekaligus masalah yang memerlukan sentuhan pemikiran dan ide-ide kreatif sekaligus teknologi. Sementara itu, insan akademis yang menekuni bidang pengabdian jumlahnya tidak banyak. Dan program yang dilakukan belum tentu berkesinambungan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang tiap tahun dilakukan secara rutin oleh banyak orang.

Maka tak heran jika hasil-hasil penelitian tersebut baru sekitar dua persen yang tersebar di masyarakat. Demikian pula mahasiswa, banyak yang berpikir terlalu jauh untuk menemukan gagasan program pengabdian padahal begitu banyak hal yang dapat dilakukan di masyarakat. Misalnya yang berkaitan dengan budidaya, pengolahan produk, manajemen usaha, pemasaran, pendidikan, kesehatan, lingkungan, pengasuhan anak, gizi keluarga, kenakalan remaja, narkoba, masyarakat berkebutuhan khusus dan lain sebagainya.

“Potensi mahasiswa yang begitu besar ini, dengan program Merdeka Belajar, semoga akan membawa kontribusi nyata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Gelora pengabdian di kalangan mahasiswa sangat perlu dibangkitkan,” imbuhnya

Salah satu contoh program pengabdian yang dinilai berhasil dilakukan oleh mahasiswa Surakarta yang mampu bersinergi dengan masyarakat setempat adalah menghidupkan kembali pasar desa yang telah lama dorman. Melalui Program Hibah Bina Desa (PHBD), mahasiswa menginisiasi masyarakat untuk bermusyawarah mencari solusi atas kendala yang menyebabkan berhentinya pasar dalam waktu yang cukup lama. Mahasiswa mengadakan aneka pelatihan pengolahan produk lokal untuk mendorong added value. Mahasiswa juga melakukan pendekatan kepada aparat pemerintah mulai tingkat desa sampai kabupaten dan mendapat dukungan dengan alasan pengembangan ekonomi masyarakat desa.

Kuliah Magang Online Fakultas Kehutanan IPB University Hadirkan Direktur IIRI Asia Tenggara



Kunci kesuksesan adalah mimpi, informasi, luar biasa, jejaring, kerja keras, jiwa kepemimpinan, dan do'a orang tua. Dalam membangun kunci kesuksesan ini, mahasiswa diharapkan memiliki nilai plus seperti soft skill, memiliki pemikiran yang kreatif dan unik serta mampu bersaing dengan cara yang luar biasa. Hal ini disampaikan Dr Yurdi Yasmi, alumni IPB University yang

saat ini menjabat sebagai Direktur IIRI Asia Tenggara saat menjadi narasumber Kuliah Magang Online yang digelar Fakultas Kehutanan IPB University, (24/6).

Menurutnya, jejaring yang baik dapat dilakukan dengan mencari informasi tentang hal yang diinginkan. Contohnya, membangun jejaring dengan mengikuti seminar-seminar yang diadakan instansi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) khususnya bidang kehutanan.

“Dari jejaring ini, saya mendapat kesempatan yang luar biasa untuk memimpin suatu penelitian di lapang sehingga melatih jiwa kepemimpinan yang saya miliki,” ujarnya.

Mahasiswa juga harus mempunyai kecakapan dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Hal tersebut dapat dilakukan jika seorang rimbawan memiliki pemikiran yang terbuka, bekerja sama dalam satu tim dengan baik, kritis tetapi konstruktif dan bisa berkomunikasi dengan lancar. Pemikiran yang kritis akan suatu masalah harus disertai solusi yang tepat dalam penyelesaiannya. (**/Zul)

Pendapatan Negara Turun 9 Persen dan Defisit Rp 1000 Trilyun



Pandemi COVID-19 menyebar secara cepat dan terus meluas. Bukan hanya masalah kesehatan, pandemi ini memberikan efek domino pada aspek sosial, ekonomi dan politik. Pemerintah harus bekerja keras agar bisa membuat kebijakan yang tepat, mengimplementasikannya dengan cepat dan tetap menjaga akuntabilitas lembaga.

“Saat ini konsumsi terganggu, investasi terhambat dan ekspor-impor berkontraksi. Hal ini membuat macet perekonomian. Kemacetan inilah yang coba kami selesaikan. Hal ini membutuhkan kerjasama intensif dan cepat dengan berbagai pihak,” ungkap Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI dalam kegiatan Business Talk yang diadakan oleh Sekolah Bisnis IPB University, (27/6).

Lebih lanjut Sri Mulyani menyebutkan bahwa pendapatan negara turun sembilan persen dan defisit lebih dari Rp 1000 trilyun. Perlambatan ekonomi terjadi pada seluruh komponen akibat penurunan aktivitas ekonomi di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah menangani masalah ini dengan mengoptimalkan bauran kebijakan dengan relokasi anggaran dan program stimulus ekonomi.

Menurutnya, pemerintah sudah berusaha maksimal dengan berbagai tindakan. Seperti memberi kelonggaran kredit dan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), menurunkan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia serta menyediakan uang higienis. Pemerintahan juga berusaha menjaga akuntabilitas dan transparansi selama masa pandemi.

“Total biaya yang dikeluarkan untuk menangani pandemi adalah 695.2 trilyun rupiah. Secara umum program penanganan COVID-19 menghadapi tantangan dalam

eksekusi di sisi regulasi, administrasi dan implementasi. Setiap hari kami perlu berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang terlibat agar komunikasi tetap terjaga,” tambah Sri Mulyani.

Sementara itu Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia mengungkapkan bahwa koordinasi kebijakan dalam pemulihan ekonomi nasional berjalan dengan baik. Pemerintah sudah bekerja dengan cepat menghadapi pandemi. Namun, kecepatan respons harus diimbangi dengan akuntabilitas dan transparansi agar tidak menyebabkan masalah nantinya.

“Kredibilitas pemerintah harus tetap dijaga dengan memberikan respon cepat membuat kebijakan yang dibarengi dengan akuntabilitas dan efektivitas dari implementasi. Setiap keputusan harus dilandasi dengan regulasi dan data yang clear. Pandemi bukan alasan jika terjadi maladministrasi,” ungkap Perry Warjiyo.

Pembicara terakhir adalah Dr Agus Joko Pramono, Wakil Ketua Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI. Menurutnya, BPK sudah melakukan identifikasi dan mitigasi risiko terkait respon cepat pemerintah dalam membuat regulasi menghadapi COVID-19. Mitigasi ini dilakukan baik untuk kegiatan operasional, masalah kecurangan dan integritas, keuangan serta kepatuhan. “Terjadi peningkatan risiko tindakan kecurangan karena penyalahgunaan wewenang dan moral hazard yang merugikan pemerintah. Selain itu kami juga menjaga validitas data serta keselarasan program antar lembaga pemerintahan. Pandemi bukan alasan untuk tidak mematuhi peraturan perundang-undangan,” tutup Dr Agus.

Terakhir adalah pemaparan dari Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria yang mengungkapkan setiap kebijakan dan tindakan harus berbasis pada ilmu pengetahuan. Setiap krisis selalu membutuhkan lompatan dan gagasan baru. Hal ini harus dikuatkan dengan basis sains dan teknologi. “IPB University semaksimal mungkin berkontribusi dalam menangani COVID-19. Kami siap terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya dalam menangani masalah pangan. Berbagai upaya sudah dilakukan. Seperti membuat aplikasi penanganan COVID-19, riset data dan membuka laboratorium pengecekan virus,” ungkap Prof Arif. **(NA/Zul)**

Dr Asep Nurhalim: Hutan Wakaf Sudah Ada Sejak Jaman Utsmaniah



Komunitas Hutan Wakaf Bogor bekerjasama dengan IPB University menyelenggarakan webinar dengan tema Pengembangan Hutan Wakaf, (27/6) yang membahas pengelolaan hutan wakaf sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat.

Dr Asep Nurhalim, Dewan Pengawas Syariah Unit Pengelola Dana Lestari dan Wakaf IPB University membuka pembahasan mengenai hukum wakaf dalam perspektif Islam. Mengambil nilai dari jaman Utsmaniah, wakaf hutan telah lama dipraktikkan. Menurutnya, praktik wakaf, utamanya wakaf hutan ini selain bermakna ibadah bagi umat muslim juga akan membantu kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Kerjasama dengan IPB University merupakan kesempatan bagi pengelolaan hutan wakaf secara luas. Tentunya pengelolaan hutan wakaf ini akan tetap berjalan sesuai dengan syariah Islam dan sejalan dengan perkembangan jaman.

Sementara itu, dalam kesempatan ini Dr Irfan Syauqi Beik yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) Unit Pengelola Dana Lestari dan Wakaf IPB University menjelaskan bagaimana optimalisasi hutan wakaf dimanfaatkan sebagai salah satu pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Melihat besarnya potensi zakat dan wakaf yang disalurkan oleh umat muslim di Indonesia, realisasi penyaluran kepada hutan wakaf juga terbuka lebar. Sebagian besar zakat berupa tanah wakaf saat ini masih berupa wakaf sosial atau non produktif karena kurangnya literasi zakat.

Dengan adanya hutan wakaf, diharapkan dapat mendorong pengembangan hasil wakaf tersebut menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat sekitar sehingga kemiskinan dapat diatasi. Utamanya output kemandirian ekonomi ini akan dibentuk melalui pendampingan program.

“Contoh salah satu program pemberdayaan yang dikembangkan oleh Baznas adalah lumbung pangan dan balai ternak. Sebenarnya zakat dan wakaf ini saling dapat mengisi satu sama lain, saling berkoordinasi. Sehingga target untuk memberdayakan masyarakat di sekitar hutan wakaf ini akan direalisasikan dengan baik,” ungkapnya.

Dr Soni Trison, dosen IPB University dari Fakultas Kehutanan mengaitkan hutan wakaf dengan program perhutanan sosial yang diusung pemerintah baru-baru ini. Sebagian besar hutan di Indonesia masih belum optimal dikelola bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya penduduk miskin di desa hutan. Hutan wakaf ini nantinya akan dikembangkan sebagai salah satu kebijakan pemerataan ekonomi oleh pemerintah yang berupa lahan, rincinya berupa Asset atau Land Tenure Right.

Pemanfaatan areal hutan wakaf tersebut juga lebih merujuk pada jasa lingkungan seperti ekowisata agar nilai lingkungannya tetap terjaga. **(MW/Zul)**

Kelola Perikanan Darat Harus Berbasis Wilayah



Potensi sektor perikanan di Indonesia sangat tinggi dalam memenuhi kebutuhan pangan negara. Sumberdaya perikanan sangat melimpah baik dari segi kuantitas maupun diversitas. Selain di laut, ikan juga banyak dibudidayakan di air tawar oleh masyarakat. Sayangnya potensi ini memang belum dimanfaatkan secara optimal.

“Pendekatan pengelolaan perikanan yang dilakukan pemerintah lebih kepada peningkatan produktivitas hasil tangkapan. Padahal masyarakat memiliki kearifan lokal dalam mengelola perikanan, baik di pesisir maupun perairan darat. Pengelolaan berbasis masyarakat ini sangat mengedepankan pada keberlanjutan ekologi,” ungkap Dr Dedi Supriadi Adhuri dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dalam Webinar Highland to Ocean (H2O) (27/6) yang digelar oleh Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University.

Menurutnya, pengelolaan perikanan berbasis masyarakat belum banyak didukung oleh regulasi pemerintah. Padahal pengelolaan perikanan ini selalu menerapkan praktik-

praktik pengelolaan berbasis keberlanjutan lingkungan. Misalnya adalah lubuk larangan di Jambi, Riau dan Sumatera Barat atau Sistem Sasi Ikan di Maluku.

“Praktik ini harus didukung dan dikuatkan agar bisa lestari di masyarakat. Metode yang bisa digunakan adalah dengan mengidentifikasi strategi dan pengetahuan melalui dialog-dialog dengan komunitas lokal. Selanjutnya pengetahuan lokal ini bisa kita kembangkan dengan perkembangan sains dan penguatan kelembagaan,” tambahnya.

Sementara itu Dr Gatot Yulianto, dosen IPB University dari Departemen MSP menyebutkan bahwa pengelolaan perikanan darat di Indonesia harus berbasis wilayah. Setiap daerah memiliki keragaman ekosistem dan spesies serta kondisi sosial ekonomi yang berbeda. Sehingga penting untuk membuat pengelolaan perikanan berbasis komunitas lokal.

“Ke depannya, tantangan pengelolaan perikanan adalah penyesuaian regulasi dengan sistem adat yang ada di masyarakat. Perlu juga pemberian hak kepada masyarakat untuk bisa mengelola dengan tujuan pemanfaatan dan konservasi. Selain itu, perlu juga riset pengelolaan dan aksi dari multipihak,” ungkapnya.

Kegiatan diskusi diakhiri dengan pemaparan dari adalah Dr Fauzan Ali, Kepala Pusat Penelitian Limnologi LIPI yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang memburuk bisa dikuatkan dari potensi perikanan. Menurutnya Indonesia memiliki potensi perikanan air tawar yang besar untuk kesejahteraan bangsa.

“Lahan budidaya ikan sebanyak 2.2 juta hektar dengan jumlah danau 5718 dan ada lebih dari 1300 jenis ikan. Keragaman ini merupakan potensi yang luar biasa jika dimanfaatkan secara optimal. Perlu adanya peningkatan pengelolaan berbasis kearifan lokal masyarakat dari segi manajemen dan sains teknologi,” tutupnya. **(NA/Zul)**

Prof Bambang Hero: Pelaku Kebakaran Hutan Kebanyakan dari Korporasi



Kasus kebakaran hutan di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Setiap tahun selalu terjadi kebakaran hutan dengan luasan wilayah hingga jutaan hektar. Hal ini menyebabkan kerugian ekonomi yang besar dan masalah kesehatan bagi masyarakat sekitar hutan. Kebakaran ini harus disikapi secara serius oleh semua pihak.

“Total titik panas yang memiliki potensi kebakaran hutan adalah sebanyak 71.634 sebaran. Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera adalah wilayah dengan sebaran titik api tertinggi. Hal ini diperparah oleh kondisi sebagaimana temuan Walhi yang menunjukkan bahwa implementasi pemantauan restorasi masih lemah, khususnya pada konsesi perusahaan,” ungkap Edo Rahman, Koordinator Kampanye Walhi Nasional dalam kegiatan FW Talk yang diadakan oleh Forum Pascasarjana IPB University (27/6).

Menurutnya, aparat penegak hukum juga sangat jarang menyoroti korporasi dalam proses pemantauan restorasi kebakaran hutan. Masyarakat adalah penerima dampak utama dari kebakaran hutan. Selain masalah kesehatan, masyarakat setempat sering dituduh sebagai pelaku kebakaran.

Sementara itu, menurut Prof Dr Bambang Hero, dosen IPB University yang merupakan pakar kebakaran hutan, kasus kebakaran hutan bisa dibongkar dengan penggunaan teknologi pemantauan satelit. Kebanyakan kasus kebakaran hutan dalangnya adalah korporasi perusahaan. Namun, perusahaan tidak akan mengakui

sampai kasus dibuktikan dalam persidangan. “Saat ditanya di lapang, biasanya pihak perusahaan tidak akan memberikan informasi. Kita bisa menggunakan data satelit untuk mengungkap fakta dengan melihat peta persebaran dan arah asap dan lainnya. Selain itu, sarana prasarana yang dibuat perusahaan untuk menangani kebakaran tidak memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah,” ujar Prof Bambang.

Menurutnya kejadian kebakaran hutan dan lahan serta yang terjadi di baliknya bisa diungkap menggunakan teknologi. Semua proses pengungkapan sudah dilindungi oleh regulasi dan perundang-undangan. Makin banyak kasus yang diungkap, diharapkan dapat menekan kerusakan lingkungan yang terjadi.

Menurut Dr Afni Zulkifli, Tenaga Ahli Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) RI, kebakaran hutan tiap tahunnya merusak hutan dengan jangkauan yang luas. Tahun 2019 saja tercatat 1,6 juta hektar lahan rusak karena kebakaran. Angka ini belum termasuk kerugian komoditas pertanian yang terdampak bahkan dampak negatifnya terhadap kesehatan.

“Di Indonesia 99 persen kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh manusia. Pemerintah sudah berusaha maksimal dengan menerapkan rehabilitasi di luar kawasan hutan dan pelaksanaan perlindungan hutan. Selain itu juga dilakukan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan,” ungkap Dr Afni.

Menurutnya pemerintah sudah mengubah paradigma dalam menangani masalah kebakaran hutan. Jika sebelumnya pendekatannya adalah pemadaman api, saat ini yang diterapkan adalah pengendalian. Kegiatan pengendalian dilakukan dari tahap perencanaan, pencegahan, penanggulangan pasca kebakaran, koordinasi kerja hingga penentuan tahap status kesiagaan. **(NA/Zul)**

Usaha Hidroponik Rumahan Bantu Penuhi Kebutuhan Pangan Selama Pandemi



Departemen Teknik Mesin dan Biosistem (TMB), Fakultas Teknologi Pertanian IPB University gelar webinar bertemakan Teknologi dan Bisnis Hidroponik untuk Hobi Bertanam di Rumah Sampai Skala Komersial, (26/6). Acara ini bertujuan agar masyarakat dapat memulai bisnis mulai dari pekarangan rumah yang bernilai ekonomi.

Dosen IPB University yang merupakan pakar Hidroponik, Prof Dr Herry Suhardiyanto berkesempatan berbagi ilmunya mengenai perkembangan teknik hidroponik bagi masyarakat awam. Menurut Rektor IPB University periode 2007-2012 dan 2012-2017 ini, usaha hidroponik rumahan dapat dijadikan alternatif untuk mendukung pola pemenuhan kebutuhan pangan negeri khususnya di masa pandemi ini.

“Unsur terpenting dalam mengelola tanaman hidroponik adalah pengendalian lingkungan pendukung

pertumbuhannya. Misalnya kadar karbondioksida dan unsur hara. Berbagai metode tanam juga dapat dipilih sesuai modal dan kemampuan petani. Teknologi terbaru seperti aquaponic NFT dan ebb and flow juga bisa menggabungkan budidaya terpadu antara tanaman dan ikan,” ujarnya.

Di era milenial ini, sudah ada artificial neural network yang dapat memantau pertumbuhan tanaman dan pendugaan kualitas hasil panen. Departemen TMB sendiri telah menerapkan budidaya tanaman hidroponik yang diberi nama mini plant factory. Selain itu, IPB University juga mengembangkan sistem kontrol cerdas (internet of things/IoT) bagi seluruh aktivitas pertanian bernama Smart Farming. “Kita bangun komunitas hidroponik Indonesia yang menghasilkan pola subcontracting dan leading company yang bisa mengatasi berbagai macam persoalan teknologi maupun pemasaran,” pungkasnya.

Sementara itu, Ir Nursyamsyu Wahyudin M.Si, Direktur Utama PT Nudira Sumber Daya Indonesia yang bergerak di bidang usaha hidroponik di Pangalengan, Bandung turut membicarakan prospek bisnis hidroponik yang kini dijalannya. Menurut pandangannya sebagai praktisi, usaha hidroponik ini menjadi penting karena memiliki banyak kelebihan dibanding cara tanam tradisional. Mulai dari efisiensi tempat dan pemberian nutrisi hingga produktivitasnya yang bisa sepanjang tahun.

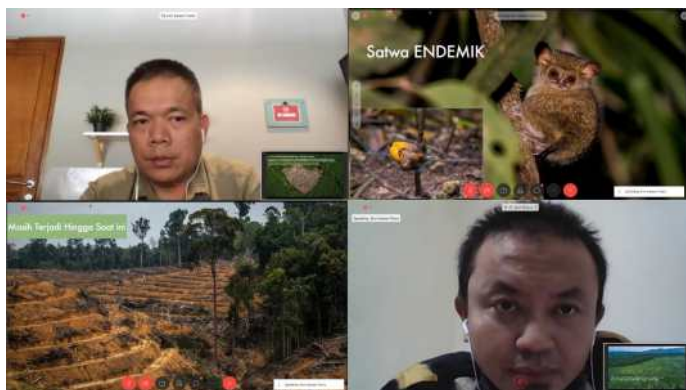
“Permintaan pasar dunia pun sedang menggandrungi hasil produk hidroponik sehingga sangat menguntungkan bagi petani karena harganya pun tergolong lebih mahal. Skala bisnis hidroponik ini beragam, mulai dari sekedar hobi hingga komersial yang dapat memakan biaya hingga satu milyar rupiah, namun modal tersebut tentunya akan sebanding dengan benefit yang diterima,” terang Nursamsyu yang kini telah memproduksi tanaman hidroponik seperti tomat ceri, baby mentimun hingga buah strawberry. Nursyamsu juga membuka kelas pelatihan bisnis bernama Nudira Hydroponic Academy bagi lulusan pertanian.

Adapun Prof Dr Aris Purwanto, dosen IPB University yang merupakan Guru Besar di Departemen TMB juga berbagi

informasi mengenai teknologi pascapanen hidroponik yang merupakan salah satu hal yang krusial. Hasil produk hidroponik haruslah memiliki penampilan yang baik serta segar dan terbebas dari mikroba hingga sisa pestisida. Maka dari itu, teknik penyimpanan dan distribusi hasil panen produk amatlah penting dengan upaya memperpanjang umur simpan dari produk tersebut karena sifatnya yang mudah rusak. Penanganannya dapat dimulai dari waktu pemanenan yang tepat, pengemasan yang baik, hingga melindungi produk dari kotoran dan kontak fisik.

Sementara itu, Ir Agus Wicaksono, CEO dan Co-Founder dari perusahaan fintech ALUMNIA berbagi mengenai crowd funding atau pendanaan bagi usaha hidroponik. Ia mengatakan bahwa pendanaan bagi petani hidroponik ini didanai berdasarkan metode blockchain-based “equity” crowdfunding, dimana investor utamanya adalah perseorangan. Dikarenakan minat pasar yang tinggi, pendanaan bagi usaha hidroponik pun semakin meningkat. Walaupun demikian, calon pengguna harus memiliki riwayat kredit yang baik. **(MW/Zul)**

Pentingnya Dokumentasi Alam Sebagai Bukti Riset dan Publikasi



Dalam Kuliah Pembekalan Magang Mandiri Online yang digelar Fakultas Kehutanan IPB University, (25/6), Een Irawan Putra SHut, Executive Director Rekam Nusantara Foundation mengatakan bahwa dokumentasi dalam meneliti kondisi hutan dan alam di Indonesia itu sangat penting.

“Dokumenter tidak hanya sekedar memahami hal teknis penggunaan kamera agar video yang di dihasilkan bagus.

Tapi juga harus memahami isu, mampu menyampaikan fakta, menjadi jembatan untuk solusi dan tentunya terjadi perubahan,” ujar alumni IPB University ini.

Pada kesempatan ini, Een Irawan juga memperlihatkan bagaimana kondisi alam dan ekosistem di dalamnya yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Tujuannya agar para mahasiswa ikut prihatin dan tergerak untuk sama-sama menjaga alam.

Kegiatan Magang Mandiri Online ini bertujuan menyalurkan mahasiswa Fakultas Kehutanan IPB University yang ingin mengisi waktu liburan untuk mengikuti magang di 48 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan lima taman nasional yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara. Waktu pelaksanaan magang yaitu tanggal 1 juli sampai 22 agustus 2020. **(**/Zul)**

Webinar Business Hack: Tips Sukses Bisnis di Bidang Penjualan dan Pemasaran



Pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya perubahan dalam dunia bisnis. Perubahan yang paling terasa adalah pola penjualan yang dulunya dilakukan secara langsung di tempat, sekarang penjualan lebih banyak dilakukan secara daring. Hal ini merupakan respon dari para pebisnis agar usahanya tetap bisa bertahan selama masa pandemi.

Merespon isu tersebut, Science Techno Park (STP) IPB University dan PT Ucoach Indonesia menggelar Webinar Business Hack dengan fokus utama terkait masalah marketing dan penjualan secara online, (26/6).

Hadir sebagai pemateri adalah Andrew Matthew, motivator bisnis sekaligus penulis buku best seller Being Happy!!. Andrew menyebutkan bahwa modal utama untuk menjadi pebisnis yang sukses adalah memiliki karakter pemimpin. Menurutnya kepemimpinan bukan sebuah kemampuan teknis tapi karakter yang harus dilatih. Setiap orang bisa mempelajari dan mengembangkan kemampuan ini.

“Seorang pebisnis sekaligus pemimpin yang hebat harus memiliki tiga hal pokok. Tiga hal tersebut adalah kegigihan, penerimaan dan rasa syukur. Kegigihan berarti bekerja keras dengan target yang jelas, lalu menerima segala kelebihan dan kekurangan diri. Selanjutnya bersyukur

adalah hal penting agar kita selalu memiliki emosi positif saat melakukan bisnis,” ungkap Andrew.

Sementara itu Eloy Zalukhu, Founder dan Direktur Capstone Asia Servitama mengatakan bahwa perusahaan harus bisa menjual jasa dan barangnya. Oleh karena itu, pebisnis harus memiliki semangat tinggi dan mampu mengenal konsumennya dengan baik. Selain itu, pebisnis harus mengetahui metode yang tepat dalam melakukan pemasaran dan penjualan.

“Saat ini channel dan media yang digunakan dalam penjualan mengalami perubahan yang signifikan. Munculnya media sosial membuat banyak bisnis menggunakannya sebagai alat untuk memasarkan dan menjual produknya. Hal ini membuat konsumen kebanjiran informasi dan memiliki banyak sekali opsi dalam menentukan pilihan produk,” tambah Eloy.

Lebih lanjut Eloy juga mengungkapkan penjualan adalah tentang memberikan nilai tambah dan melayani konsumen dengan sebaik-baiknya. Hubungan baik dan keterikatan antara bisnis dengan pelanggan adalah kunci utamanya. Menggunakan media sosial menjadikan tantangan tersendiri bagi para pebisnis menjaga hubungan dengan pelanggannya. **(NA/Zul)**